

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, R. N. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, A., & Ilyas, A. (2018). *KRIMINOLOGI Suatu Pengantar*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Andriadi, A. (2012). *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem KetataNegaraan Republik Indonesia (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Makassar.
- Amir, Chaerul. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsan, K., & Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Jusuf, M. (2014). *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justicia.

- Mohammad, Makarao, T., & Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia.
- Prints, D. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan.
- Priyanto, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal - Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia: Jakarta.
- R. Soebakti. (1975). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. (1985). *Tehnik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHP)*. Bogor: Politeia.
- R. Sugandhi. (1981). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa. (2013). *Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*. Jakarta: BPHN.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Undang-Undang dan Peraturan Sejenis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana)

Herzein Inlandsch Reglement (HIR).

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/07/2017 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Benda Sitaan atau Barang Rampasan Atau Benda Sita Eksekusi

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan

Barang Rampasan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang
Pengelolaan Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP.

Artikel dalam Jurnal dan Majalah

Makalew, Marcelino Imanuel. Substansi Barang Bukti Dalam Hukum
Pembuktian Pada Peradilan Pidana, Jurnal Hukum *Lex Privatum*,
Fakultas Hukum Unsrat. Vol IX, Nomor 8 Tahun 2021

Tjondroputranto, Handoko. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik,
Diktat Kuliah Pendidikan Pembentukan Jaksa pada Pusdiklat
Kejaksaan Agung RI, Tahun 1981.

Skripsi

Immanuel Christian M Sinaga. 2019. *Peranan Kejaksaan Dalam
Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti*. Skripsi. Medan: Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.

Muhammad Akbar Fajar. 2021. *Peran Penuntut Umum Dalam
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri
Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Website:

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7. Diakses pada
hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 10.32 WITA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html>. Diakses pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 07.05 WITA.

<https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf>. Diakses pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 07.59 WITA.

<https://kejarimakassar.kejaksaan.go.id>. Diakses pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 14.00 WITA.